

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur mengenai hak dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan PPPK

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku:

A.W. Widjaja. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali, 2006.

Alwi Hassan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Amin Widjaja. *Etika Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.

Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Anggara Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Ateng Syafrudin. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian. *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I 2024*,” (Jakarta: Badan Kepegawaian Negara, 2024
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror. *Lembaga keuangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1983.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Juniarto. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 1998.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003.
- Musafet. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Philipus M. Hadjon. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satrio Wibowo. *Hukum Kepegawaian*. Tulungagung: Biru Atma Jaya, 2022.
- Sjachran Bosoh. *Eksistensi*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Soedaryono. *Tata Laksana Kantor edisi 6*. Jakarta: Bumi Aksa, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1981.
- Soerwono Handayaniingrat. *Negara: Pemerintahan dan Aparaturnya*. Bogor: CV. Ananda, 2002.
- Sri Hartini. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Vladimir Rys. *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Alvabet, 2011.
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Winarno Surachmad. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV Tarsito, 1973.
- Yudi Latif. *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Jurnal:

Agus Darmawan. "Politik Hukum Omnibus Law dalam Kontek." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1. no.1, 2020.

Ahdi Rajab. "Ratio Legis Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menggantikan Keberadaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Hukum Kepegawaian Indonesia." *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara* 1. no. 2, 2024.

Ahmad Dahlan. "Menggagas Negara Kesejahteraan." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 2. No. 1, 2014.

Akbar Bram Mahaputra, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014". *Jurnal Kertha Negara* 03. No. 02, 2015.

Aulia Zahra, Meyzia Akilah, dan Raisya F. Humaira. "Analisis Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023." *Journal Of Economic. Business and Accounting (Costing)* 7. No. 5, 2024.

Batubara, Soulthan Saladin, dan Bima Satria. "Eksaminasi Kinerja Aparatur Sipil Negara: Relasi Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja." *EKOMA: Jurnal Ekonomi. Manajemen. Akuntansi* 4. no.1, 2024.

Budoyo. B.T.S. "Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Siswa Kerja Praktek Berdasarkan Permenaker RI Nomor 1 Tahun 2016 UPTD BLK Kota Semarang". *Universitas Semarang*, 2020.

Edi Suharto. "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos." in *Makalah Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia*, 2006.

Fajrul Falah Zihan, Sonhaji, dan Suhartoyo. "Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh Batik di Kota Pekalongan". *Diponegoro Law Journal* 6 no.2, 2017.

- Febrianti, Riska, Samsir Rahim, dan Nur Wahid. "Strategi Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3. no. 3, 2022.
- Galela dan Muhammad Ridhwan. "Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015." *Info Artha* 5, 2016.
- Gusti Ayu Ratih Damayanti. "Freies Ermessen dalam Konsep Negara Kesejahteraan." *Jurnal Advokasi* 6. No. 1, 2016.
- Henny Juliani. "Diskresi dalam Rekrutmen Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja." *Administrative Law and Governance Journal* 2. No. 2, 2019.
- Henny Juliani. "Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas." *Administrative Law and Governance Journal* 2. No. 1, 2019.
- Ida Ayu W, Ibrahim, dan I Ketut Suardita. "Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN." *E-Journal Universitas Udayana* 5, 2019.
- Idariyah. "Analisis Perbandingan Asas Kesetaraan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara", 2023.
- Laica Marzuki. "Kebijakan yang Diperjanjikan (*Beleidosovereenkomst*)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21. no. 3, 1991.
- Lubis, Arif Hidayat, Istiaza Azra, dan T. Zaskya Azhar Azaddin. "Mekanisme dan Penyelenggaraan Lembaga-lembaga Penyelenggara Dana Pensiun." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1. no. 4, 2024.
- M. Irfan Rahmasi. "Instrumen Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara". Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019.
- Mahardhika, Dekki Ikrar, Karmanis Karmanis dan Rini Werdiningsih. "Upaya Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Menuju ASN Bertaraf Internasional." *Jurnal Media Administrasi* 6. No. 2, 2021.

- Marilang. "Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara atas Barang Tambang." *Jurnal Konstitusi* 9. No. 2, 2012.
- Marilang. "Nilai Keadilan Sosial dalam Pertambangan". *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hassanudin*, 2010.
- Marshall Josua Charles. "Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2. no. 1, 2022
- Michael Adler dan Paul Henman. "Computerizing The Welfare State: an International Comparison of Computerization in Social Security." *Information Communication and Society* 8. No. 3, 2005.
- Nugraha. B.A "Pengawasan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah". *Universitas Semarang*, 2023.
- Nur Eka Muchtar. "Tata Kelola Pelayanan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT TASPEN Kantor Cabang Utama Makassar, 2019.
- Nurmalita Ayuningtyas Harahap. "Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Hukum Justicia Et Pax* 32. no. 2, 2016.
- Parkher. J. A. A.. dan Radjab. D. "Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Sistem Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1 no.3, 2021.
- Purwoko. B. "Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip., Sifat Kepesertaan, dan Tata-Kelola penyelenggaraan di Beberapa Negara". *Makalah untuk keperluan sosialisasi program Jamsostek dalam Seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jamsostek*, 2010.
- Putra. Y. A. dan Istiana. I. "Perlindungan Hukum untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Diputus Hubungan Kerja oleh Pemerintah". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4 no.2, 2023.

- Raga, Johanes Marianum. "Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Belu." *Jurnal sosial dan sains* 1. no. 6, 2021.
- Rahmat Saputra. "Rekonstruksi Politik Hukum Jakarta Aparatur Sipil Negara Berbasis Nilai Keadilan." *Krtha Bhayangkara* 15. No. 2, 2021.
- Rakhmawati, Mustika Arin, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono. "Tanggung Jawab PT TASPEN terhadap Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara." *Diponegoro Law Journal* 5. no. 2, 2016.
- Ramadhan, F. M. "Kepastian Hukum PPPK dalam Sistem ASN." *JDIH Bappenas* 16 no.2, 2016.
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. "Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Institusi Perguruan Tinggi." *Jurnal Yuridis*. 7 no.1, 2020.
- Rays, M. I., dan Mina R. "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Tata Cara Pengangkatan dan Kedudukannya." *Jurnal Yustisiabel*. vol. 6 no.2, 2022.
- Riris Katharina. "Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13. No. 2, 2018.
- Rismayani dan Masruroh. "Implementasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 10 No.1, 2021.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing. "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial". *Jurnal Legislasi Indonesia* 9 No.2, 2012.
- Setiawan, Irfan dan Gradiana Tefa. "Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49. no. 2, 2023.

- Simanungkalit, Janry Haposan Uli Panusunan. "Struktur Gaji Pegawai Negeri Sipil Upaya Pencapaian Keadilan Internal dan Eksternal PNS." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. Pusat Pengkajian dan Penelitian*, 2018.
- Siti Halilah. "Instrumen Tindak Pemerintahan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6. no. II, 2023.
- Siti Rahimi, Imsar dan Wahyu Syarvina. "Penerapan Jaminan Asuransi Kesehatan terhadap Perlindungan Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi pada BPJS Kesehatan Cabang Langkat." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5. no. 3, 2024.
- Solechan. "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2. no. 4, 2019.
- Suhartoyo. "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)." *Administrative Law dan Governance Journal* 2. No. 1, 2019.
- Suhartoyo. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit." *Administrative Law and Governance Journal* 1. no. 1, 2018.
- Suryawi, Salwa Husna Sekai, dan Asianto Nugroho. "Telaah Implikasi Perbedaan Status Kepegawaian PPPK dan Pemenuhan Ham dalam Payung Hukum PPPK di Indonesia." *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2. No. 2, 2023.
- Tri Putranto. "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pengertian dan Urgensinya." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS* 9. no. 2, 2015.
- Vincen, Wulandari Frederick, dan Jemi Sondakh. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban PT TASPEN dalam Pelayanan Dana Pensiun pada Pesertanya." *LEX ADMINISTRATUM* 10. no. 4, 2022.
- Winda Roselina Effendi. "Konsep Welfare State di Indonesia." *Jurnal Trias Politika* 1. No. 1, 2017.
- Yoyok Setyo dan Mega Fitrya Wilasari. "Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi (Tinjauan Literatur)." *Nusantara Innovation Journal* 2. No. 1, 2023.

Zsazsa, Cut Sah Kha Mei dan Ridwan Nasution. "Transformasi Birokrasi di Indonesia." *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society* 3. No. 2, 2023.

Website:

Badan Kepegawaian Negara (BKN), "Penggajian dan Tunjangan PPPK," diakses pada tanggal 20 Januari 2025, https://denpasar.bkn.go.id/kms/ensiklopedia:penggajian_dan_tunjangan_ppk.

Tri Widodo W Utomo, "Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", diakses pada tanggal 23 oktober 2024. <HTTP://TRIWIDODOWUTOMO.BLOGSPOT.COM/2013/07/MEMAHAMI-KONSEPNEGARA-KESEJAHTERAAN.HTML>.

WIKIPEDIA, "Welfare State", diakses pada tanggal 23 Oktober 2024. <Http://www.En.Wikipedia.Org/Wiki/WelfareState>